**LAPORAN HASIL PENELITIAN DASAR**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**



## EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. | 0025087108 | 6680894 |
| Dr. Amnawaty, S.H., M.H.  Ahmad Zazili, S.H., M.H.  Siti Nurhasanah, S.H., M.H. | 0024045704  0013047406  0011027102 | 6109910  6037334  6680950 |

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS LAMPUNG**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

1. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK

2. Kode/nama rumpun ilmu : Ilmu Hukum

3. Ketua Peneliti

1. Nama : Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
2. NIDN : 0025087108
3. SINTA ID : 6680894
4. Jabatan Fungsional : Lektor
5. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan
6. Nomor HP : 081272566066
7. Alamat surel (e-mail) : mwendytrijaya@gmail.com

Anggota (I)

1. Nama : Dr. Amnawaty, S.H., M.H.
2. NIDN : 0024045704
3. SINTA ID : 6109910
4. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan

Anggota (2)

1. Nama : Ahmad Zazili, S.H., M.H.
2. NIDN : 0013047406
3. SINTA ID : 6037334
4. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan

Anggota (3)

1. Nama : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
2. NIDN : 0011027102
3. SINTA ID : 6680950
4. Program Studi : Ilmu Hukum Bagian Keperdataan

4. Jumlah mahasiswa yang terlibat : 2 (dua) orang,

a. Muhammad Djalal (1852011046)

b. Kharisty Aulia (1812011166)

5. Lokasi Kegiatan : Bandar Lampung

6. Lama Kegiatan : 6 (enam) bulan

7. Biaya Kegiatan : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

8. Sumber Dana : DIPA FH Unila 2021

Mengetahui Bandar Lampung, 26 April 2021

An. Dekan Fakultas Hukum, Ketua Tim Peneliti,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

NIP 197812312003121003 NIP 197108252005011002

Menyetujui,

Ketua LPPM Unila

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA

NIP 196505101993032008

1. Judul penelitian

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

## : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK

1. Tim peneliti : 1. Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
2. Dr. Amnawaty, S.H., M.H.
3. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
4. Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Bidang Keahlian** | **Program Studi** | **Alokasi Waktu (Jam/Minggu)** |
| 1 | Moh. WendyTrijaya, S.H., M.Hum. | Ketua | Hukum Bisnis | Ilmu Hukum | 10 jam |
| 2 | Dr. Amnawaty, S.H., M.H. | Anggota | Hukum  Islam | Ilmu Hukum | 10 jam |
| 3 | Ahmad Zazili, S.H., M.H. | Anggota | Hukum dan Masyarakat | Ilmu Hukum | 10 jam |
| 4 | Siti Nurhasanah, S.H., M.H. | Anggota | Hukum Bisnis | Ilmu Hukum | 10 jam |

* 1. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):

Sertifikasi Halal pada Produk Kosetik

* 1. Masa pelaksanaan

Mulai : April Tahun 2021 Berakhir : September Tahun 2021

* 1. Usulan biaya Rp. 15.000.000
  2. Lokasi penelitian: Bandar Lampung
  3. Instansi lain yang terlibat: BPJPH dan BPOM
  4. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

Hukum Islam

* 1. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah Jurnal TerAkreditasi

## Ringkasan

Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah dan sehat untuk manusia. salah satunya penggunaan kosmetik dan oba obatan. Perkembangan industri kosmetik dan perawatan diri di negara Indonesia telah meningkat sangat pesat, dimana industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, terdapat permasalahannya yang muncul yaitu bagaimana efektivitas pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung dan apa sajakah hambatan-hambatan dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah, membentuk landasan kebijakan pemerintah dan inventarisasi produk ke dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Landasan kebijakan dalam bentuk peraturan sangat dibutuhkan berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh para pengguna atau konsumen kosmetik. Mereka mengharapkan adanya perlindungan hukum dalam menggunakan produk kosmetik yang mereka gunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach). pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan landasan kewenangan pemerintah dalam mengatur mengenai pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung

Penelitian ini sejalan dengan rencana strategis penelitian Universitas Lampung yaitu pada fokus topik riset (a) aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan (b) Perlindungan hukum terhadap kegiatan bermasyarakat

Urgensi penelitian ini adalah menganalisis isi peraturan tentang sertifikasi halal dan penerapannya dalam praktik. Selain itu out put lain dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada pertemuan ilmiah dan jurnal nasional.

## PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

## Kosmetik saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer bagi para wanita Indonesia guna tampil lebih cantik dan menarik. Sebagai kebutuhan primer, maka banyak muncul produk kosmetik untuk wanita di Indonesia. Para produsen kosmetik mulai berlomba dan berinovasi dalam membuat dan menciptakan produk-produk kosmetik tersebut.

## Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah dan sehat untuk manusia. Islam mengajarkan kita agar senantiasa untuk selalu mengkonsumsi yang ada di muka bumi ini yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman juga seperti kosmetik, obat-obatan dan lain-lainnya.

## Al Qur'an dan Al Hadis sebagai sumber hukum yang utama bagi umat Islam telah secara jelas dan tegas menetapkan bahwa ada makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik yang halal dan baik untuk dikonsumsi dan digunakan namun ada pula makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik yang haram untuk dikonsumsi dan digunakan, serta ada pula bahan pangan dan produk lainnya hasil olahan rekayasa genetik yang dapat menimbulkan keraguan mengenai status halal atau haramnya.[[1]](#footnote-1)

## Perkembangan industri kosmetik dan perawatan diri di negara Indonesia telah meningkat sangat pesat, dimana industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Industri kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan., dari total tersebut sebanyak 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah (IKM) dan sisanya industri skala besar.

## Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementrian Perindustrian, pelaku industri kosmetik sulit meningkatkan kinerja bisnisnya akibat penguasaan pangsa pasar produk impor sebesar 60% dari total pasar domestik senilai Rp 15 triliun. Pasar kosmetik kelas menengah ke atas banyak didominasi produk dari Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dan untuk kelas menengah banyak dihuni oleh produk asal Thailand, Korea Selatan dan Malaysia. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk kosmetik yang ternotifikasi mayoritas hadir dari produk impor dalam waktu kurun waktu 2011-2014. Tahun lalu produk kosmetik yang teregistrasi sebanyak 36.642 yang berasal dari produk lokal sebesar 40,52%, produk ASEAN 4,69%, Eropa 28,58% dan negara lainnya 26,21%.

## Upaya dalam menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.[[2]](#footnote-2)

## Pemerintah Indonesia dalam mengingat pentingnya produk kosmetik halal tersebut memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan mencantumkan label halal pada produk kosmetik, baik kosmetik yang dibuat di Indonesia maupun produk kosmetik yang dibuat dan di impor dari luar negeri. Berbagai peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

## Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 8 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label halal.

## Memenuhi perlindungan terhadap produk kosmetik tersebut maka pemerintah dibantu oleh badan dan lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau dikenal dengan LPPOM-MUI dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau dikenal dengan BPOM sebagai lembaga pengaudit sertifikasi halal telah digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disingkat dengan (BPJPH).

## BPJPH adalah sebuah lembaga pelaksanan sertifikasi halal yang berada di bawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekaligus menjadi babak baru penyelenggaraan sertifikasi produk halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan di resmikan pada 11 Oktober 2017, namun untuk sementara waktu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih menunggu Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal demi membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan demikian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) masih berwenang melakukan tugas sebagaimana yang dilakukan selama ini dalam penerbitan sertifikasi halal.

## LPPOM-MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika tersebut aman dikonsumsi dan digunakan baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim di Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. [[3]](#footnote-3)

## Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk kosmetik di daerah Bandar Lampung.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung?

## Tujuan Khusus

Penelitian ini diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan/target penelitian seperti; (1) Menganalisa efektifitas pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung (2) Menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung

## Urgensi Penelitian

Adapun yang menjadi faktor penting dari penelitian ini adalah mengembangkan penerapan pelaksanaan pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung. Selain itu, dengan adanya partisipasi pemerintah diharapkan kebijakan pemerintah dapat diarahkan untuk memberikan perlindungan dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. **Pengertian Kosmetik dan Jenis Kosmetik**

Definisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.[[4]](#footnote-4)

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut antara lain untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.[[5]](#footnote-5)

Perkembangan kosmetik yang semakin tinggi membuat para produsen berlomba-lomba dalam mengeluarkan berbagai jenis produk kosmetik, baik produsen yang berada di dalam negeri maupun produsen yang berada di luar negeri. Namun hal ini juga harus berdasarkan pada jenis izin edar pada produk kosmetik tersebut. Berikut merupakan jenis produk kosmetik berdasarkan izin edarnya, yaitu:

* 1. Kosmetik Lisensi

Kosmetik lisensi adalah kosmetik yang di produksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar penunjukan atau persetujuan tertulis dari pabrik induk negara asal.[[6]](#footnote-6)

1. Kosmetik Import

Kosmetik import adalah kosmetik produksi pabrik kosmetik luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. Sebagai contoh pada saat ini Indonesia mulai dimasuki oleh budaya dari timur yaitu tepatnya budaya Korea Selatan, baik dari gaya berpakaian hingga kosmetik.[[7]](#footnote-7)

1. **Label Halal**

Pencantuman halal pada suatu label produk adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh pelaku usaha untuk lebih memperhatikan hak konsumen. Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.[[8]](#footnote-8) Label halal juga harus mencantumkan hal-hal yang bersifat umum pada bagian utama label halal seperti adanya larangan tentang penulisan label halal ditulis dalam bentuk tulisan yang sulit dilihat, diamati atau dibaca yang hal itu akan berdampak pada pelanggaran hak-hak konsumen.

Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang semacam Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPM-MUI) untuk memastikan bahwa suatu produk itu sudah lolos pengujian kehalalan.[[9]](#footnote-9) Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.[[10]](#footnote-10)

Banyaknya pemalsuan dan label beredar di pasaran sering memperdaya atau menyesatkan konsumen, dimana juga akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat sesama produsen, mendorong terbentuknya suatu badan hukum yang mengatur tentang syarat pengemasan dan pemberian label yang benar. Dimana dalam label harus ada kejelasan yang dapat menunjang kenyamanan konsumen dalam pemakaian suatu produk. Pemberian label yang benar harus memuat informasi yang dibutuhkan oleh konsumen seperti tanggal kadaluarsa yang menginformasikan jangka waktu penggunaan produk tersebut, label keterangan gizi yang terkandung dalam pembuatan produk, penetapan harga per unit dari ukuran standar dan penetapan label halal bagi masyarakat yang mayoritas muslim.

1. **Sertifikasi Halal**
2. **Pengertian Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal terdiri atas dua kata yaitu “sertifikasi” dan “halal”. Sertifikasi sendiri adalah sebuah proses untuk memperoleh sertifikat. Menurut KBBI “Sertifikat” adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. [[11]](#footnote-11)

Sedangkan halal berarti segala sesuatu yang dibenarkan dan tidak dilarang menurut syariat islam. Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola sertifikasi halal yang berfungsi untuk menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

Sertifikasi halal harus memenuhi 3 unsur di dalamnya yaitu secara fiqh, sains dan bisnis. Pertama dari unsur fiqh, artinya persoalan sertifikasi halal harus disesuaikan dengan mahzab mana yang akan dijadikan rujukan. Sehingga ada standard yang harus dipenuhi dalam yang menentukan syarat dan prosedursuatu produk yang akan memperoleh sertifikasi halal.

Kedua, apabila ditinjau dari unsur sains, suatu produk makanan tentu akan melewati bebeapa proses kimiawi dalam pengelolaannya. Disinilah tugas dari ilmu pengetahuan dan para ilmuan dalam melihat sejauh mana kandungan dzat di dalam produk tersebut. para ilmuan akan berperan dalam persoalan food prosecing, persoalan warna dll. Sehingga nantinya hasil uji terhadap produk makanan yang dilakukan para scientist tersebut menjadi dasar bagi para ulama dalam memutuskan produk tersebut halal atau haram. Oleh karena itu, tidak ada fatwa yang keliru, yang ada hanyalah informasi yang kurang lengkap yang disampaikan oleh para scientist kepada para ulama. Artinya, apabila ada lembaga pengelola sertifkasi halal yang hanya berisi para ulama tanpa melibatkan para scientist, maka hal itu dapat diragukan. Demikian sebaliknya, lembaga pengelola sertifikasi halal tidak bisa diisi oleh para scientist saja, karena mereka tidak memiliki otoritas untuk mengatakan halal atau haram. Sehingga lembaga pengelola sertifikasi halal harus diisi oleh para ilmuan dan para ulama yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa.

Ketiga apabila dilihat dari unsur bisnis. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Sertifikasi Halal bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Sertifikasi Halal MUI adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.[[12]](#footnote-12) Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.[[13]](#footnote-13) Namun sertifikasi halal MUI masih bersifat voluntary (sukarela), sehingga belum ada mandatory (kewajiban) dari pihak pelaku usaha untuk mendaftarkan poduknya agar dapat memperoleh sertifikasi halal. Sehingga masih banyaknya ditemukan produk makanan yang belum bersertifikasi halal.

1. **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)**

Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Selanjutnya dipertegas lagi di dalam Pasal 815 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag, menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Struktur BPJPH terdiri atas Sekretariat dan tiga pusat, yaitu: Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal. Lembaga ini beralamat di Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti, No. 13 Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.[[14]](#footnote-14)

Mengenai wewenang BPJPH sendiri ditur dalam pasal 6 UU JPH yaitu:

* 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

1. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
2. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat halal dan Label Halal pada produk luar negeri;
3. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
4. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal;
5. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
6. Melakukan registrasi auditor Halal;
7. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
8. Melakukan pembinaan auditor Halal; dan
9. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. [[15]](#footnote-15)

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 UU JPH, dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH akan bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait, yaitu:

* 1. Kementerian dan/atau lembaga terkait
  2. LPH, dan
  3. MUI

Sebelum BPJPH terbentuk, kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi halal masih berada di tangan LPPOM-MUI yang berada di bawah naungan MUI yang sifatnya sukarela dan tidak terikat pada pemerintah. Karena sifat kesukarelaan inilah sehingga menyebabkan tidak adanya keharusan secara khusus kepada setiap pelaku usaha mengenai standarisasi halal produknya serta belum memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim. Namun, setelah BPJPH ini telah dibentuk secara sah oleh pemeritah, maka kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal telah beralih kepada BPJPH selaku Lembaga Penjamin Sertifikasi Halal yang berada di bawah naungan Kementrian Agama RI. [[16]](#footnote-16)

1. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid;
2. Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar. [[17]](#footnote-17)

Sebagai pembimbing dan pelayan umat tentunya MUI memiliki kewajiban dalam mengayomi kehidupan umat muslim, dan tak luput pula dalam hal pengawasan terhadap halal haramnya makanan yang dikonsumsi. Karena dalam islam, mengkonsumsi makanan lebih dari sekedar pemenuhan kehidupan lahiriah, tapi juga merupakan suatu bagian dari syariat yang harus dijalankan. Untuk mewujudkan hal tersebut, MUI membentuk sebuah lembaga yang berwenang dalam mengawasi makanan yang akan dikonsumsi oleh umat muslim, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih dikenal dengan LPPOM-MUI. LPPOM-MUI berdiri tanggal 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep./18/MUI/I/1989, dengan rencana kegiatan utama melaksanakan pemeriksaan produk halal yang kemudian disebut sertifikasi halal. sertifikat halal dikeluarkan pertama kali oleh MUI berdasarkan hasil audit dari LPPOM MUI baru tahun 1994 setelah LPPOM MUI memperoleh persetujuan dari Menteri Agama ketika itu.[[18]](#footnote-18)

Peran utama LPPOM MUI adalah memberikan pengawasan terhadap makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika yang dikonsumsi oleh umat muslim. Namun, saat ini, kewenangan LPPOM-MUI dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan maupun kosmetika yang beredar dikonsumsi oleh umat muslim telah diambil alih oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

## BAB III METODE PENELITIAN

1. **Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengindentifikasi pokok bahasan, subpokok bahasan berdasarkan rumusan masalah;
2. Atas dasar setiap subpokok bahasan yang sudah teridentifikasi tersebut, diinventarisasi pula ketentuan-ketentuan hukum normatifnya;

Hasil implementasi, yaitu kesesuaian pemberian saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Perundang-undangan

1. **Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data**

Data yang dijadikan pedoman dalam penulisan penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang sudah ada dalam bentuk jadi seperti peraturan perundang-undangan, literatur hasil penelitian, dan buku-buku ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pokok bahasan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, media massa, jurnal, internet, dan informasi lainnya yang mendukung penelitian ini

Berdasarkan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang terdiri dari:

* 1. Studi Pustaka

Cara ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mengutip atau merangkum bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

1. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan pokok bahasan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan pokok bahasan khususnya dokumen mengenai sertifikasi hahal pada produk kosmetik yang menjadi objek kajian, sehingga memudahkan dalam proses pengolahan data tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

* 1. Identifikasi Data

Identifikasi data adalah menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

1. Seleksi Data

Seleksi data adalah memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila ada kesalahan pada data akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah pengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

1. Sistematika Data

Sistematika data adalah penelusuran data berdsarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai denga ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik.

1. **Tahap Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan Input, Proses dan indikator capaian digambarkan dalam bagan alir berikut ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
|
|  | |
|  | |
| Tahap I  Menginventarisir dan mengidentifikasi peraturan hukum nasioanl tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik | |
| Terinventarisir dan teridentifikasi peraturan hukum nasional tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik  Inventarisasi peraturan hukum nasional tentang j sertifikasi hahal pada produk kosmetik | |
|  | |
|  | | |  | | |
|  | |
|  | |
|  |  | | | |  | |

Tahap II

Pemetaan dan Analisis peraturan Hukum Nasioanal tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

Pemetaan dan analisis Undang-undang tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

Hasil :Sudah ada peraturan hukum nasional yang mengatur tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

Hasil Akhir :

Perlu dibuat secara khusus Peraturan tentang sertifikasi hahal pada produk kosmetik

# BAB IV

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Efektivitas pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung.**

Sertifikasi Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi halal MUI -pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal.

Pengetahuan informan tentang sertifikasi halal masih belum terlalu luas. Produk-produk yang berlabel halal tidak dimengerti secara mendalam oleh informan. Padahal banyak keuntungan ataupun kelebihan yang bisa didapatkan dari produk makanan dan minuman yang berlabel halal. Permasalahan rendahnya pemahaman sertifikasi halal pada masyarakat disebabkan oleh berbagai hal antara lain kurangnya sosialisasi dan edukasi di lingkungan atau kalangan masyarakat tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal pada kemasan produk kosmetik sejatinya memberikan informasi bahwa produk kosmetik tersebut adalah produk yang halal karena telah melewati proses uji kehalalan oleh badan yang berwenang yaitu BPJPH beserta MU. Label halal memberi kemudahan bagi para konsumen muslim yaitu masyarakat Kabupaten Takalar agar tidak perlu merasa ragu-ragu untuk membeli prduk kosmetik. Jaminan kepastian halal suatu kosmetik, eksistensinya terlihat dalam bentuk sertifikasi halal dan label halal pada kemasan produknya, dengan kata lain untuk mengetahui informasi halal-haram atas produk dapat diketahui melalui penggunaan label. Tanpa label (tanda) masyarakat sulit memastikan bahan mentah, komposisi dan proses yang dilalui produk tersebut.

Masyarakat cukup menyadari bahwa logo halal pada sebuah produk kosmetik itu sangat penting untuk konsumen muslim karena dengan itu berarti LPPOM-MUI telah menguji atau meneliti produk tersebut sebelum dikeluarkannya label halal. Dengan adanya logo halal pada produk kosmetik dapat membantu umat Islam untuk memastikan produk yang akan dikonsumsi itu halal. Label halal sangat mengingat jumlah penduduk Takalar mayoritas Muslim, hal ini juga penting untuk menjamin konsumen muslim tidak melanggar hukum agamanya dalam hal mengonsumsi bahan yang jelas diharamkan. Dalam hal ini LPPOM-MUI menyiapkan sistem yang memuat syarat dan ketentuan untuk menentukan sertifikat dan pemberian label halal suatu produk, dengan memastikan konsistensi kehalalan dimulai dari bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, fasilitas yang digunakan, proses pembuatan dan pengolahan, hingga produk jadi yang siap didistribusikan ke pasaran. Logo halal sebenarnya memudahkan kita untuk meyakinkan bahwa suatu produk memang sudah teruji kualitasnya dan secara syariat dijamin kehalalannya. Pada kondisi dimana kita tidak mungkin mengecek sendiri status kehalalan suatu produk maka dengan adanya LPPOM dan MUI yang berfungsi untuk melaksanakan tugas tersebut. Apalagi dengan kondisi dimana produk pangan tersebut diproduksi di tempat yang lokasinya jauh dari tempat tinggal kita atau merupakan produk impor maka keberadaan logo halal yang diakui yang terdapat dalam kemasan produk dapat menjadi jaminan bagi kita bahwa produk tersebut dijamin kehalalannya. Tujuan pencantuman logo halal pada produk kosmetik adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk kosmetik tersebut benar-benar halal sesuai dengan yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk kosmetik, karena pada kemasan produk kosmetik tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan sertifikasi halal ditengah masyarakat belum terlalu meningkat hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membeli sebuah produk kosmetik tanpa memperhatikan logo halalnya. Mereka hanya membeli produk kosmetik berdasarkan dari merknya saja masih perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai sertifikasi halal. Padahal potensi produk halal tidak hanya bermanfaat pada konsumen Muslim di Indonesia. Hakekatnya produk halal berdasarkan Standar Syariah adalah produk yang sehat dan berkualitas serta terjamin kehalalannya. Sehingga produk halal menjadi jaminan halal dan kualitas produk yang bermanfaat bagi siapapun. Label halal juga menjadi jaminan produk halal sekalipun diproduksi di Negara Non-Muslim. Produk bersertifikasi halal kemudian diberi label halal membuat masyarakat merasa terjamin oleh Negaranya. Kondisi ini dapat mengurangi keresahan di tengah masyarakat, menciptakan kemaslahatan dan menguatkan stabilitas Negara. Kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal tidak hanya terbatas pada kosmetik halal, termasuk juga didalamnya kosmetik halal. Kesadaran konsumen muslim untuk menggunakan kosmetik dan perawatan tubuh menarik minat para produsen. Pilihan produk kosmetik halal bagi wanita muslimah dipengaruhi oleh pemahaman agama Islam nya dan pengaruh orang-orang di sekitarnya mendorong konsumen untuk membeli produk kosmetik halal. Pada intinya minat masyarakat terhadap produk bersertifikasi halal terus meningkat. Upaya pengembangan produk-produk halal terus berlangsung di masyarakat. Trend minat konsumen muslim di Kabupaten Takalar terus meningkat terhadap produk bersertifikasi halal di tahun 2016-2019 menjadi gambaran perilaku konsumen Takalar yang semakin peduli terhadap keberadaan produk bersertifikasi halal. Dengan diberlakukannya UU JPH diharapkan pengembagan produk bersertifikasi halal dapat memberikan manfaat ekonomi masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, lembaga non pemerintah, peniliti, pelaku usaha menjadi faktor yang menguatkan industri halal di masa mendatang.

1. **Hambatan-hambatan dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung**

Sistem jaminan produk halal diharapkan dapat menjadi standar baru dalam bidang produksi produk kosmetik bagi pelaku usaha, selain itu. Pemerintah dalam hal ini terus menggiatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Melalui BPJPH Bandar Lampung, pemerintah terus memastikan agar pelaku usaha terus menyediakan produk yang melalui proses sertifikasi halal, hal ini bertujuan untuk memastikan adanya proteksi terhadap keamanan, serta adanya perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat pada saat mengkonsumsi dan memakai produk yang sudah terjamin halal serta higienis, demi terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu hambatan-hambatan dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Belum Adanya Regulasi (Peraturan Gubernur) Terhadap Pembentukan Tim Terpadu
2. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Sistem Jaminan Produk Halal.

Pemenuhan terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, bentuk ganti kerugian bisa dalam bentuk pengembalian uang atau mengganti dengan barang dan/atau jasa yang sama nilainya, atau biaya perawatan dan/atau pemberian dana santunan sesuai dengan aturan hukum. Menurut hukum tentang product liability konsumen yang dirugikan dan akan menuntut ganti kerugian pada prinsipnya diharuskan untuk memperlihatkan 3 (tiga) hal, diantaranya produk dalam keadaan cacat pada saat diterima dari produsen, cacatnya produk tersebut dapat mengakibatkan kerugian materil atau inmateril, adanya kerugian yang dapat diperlihatkan.

Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK menjelaskan bahwa ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal transaksi. Mengenai ketentuan yang diatur dalam ayat (1) dan (2), tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa kesalahan itu adalah kesalahan konsumen seperti yang diatur pada ayat (5).

Kelemahan juga terdapat pada Pasal 19 ayat (3) UUPK, bilamana ketentuan pada Pasal ini tetap digunakan sebagai landasan ganti kerugian, maka konsumen yang mengkonsumsi barang pada hari ke 8 (delapan) setelah membeli barang dari pelaku usaha maka tidak akan mendapatkan kompensasi berupa ganti kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara tegas dan jelas konsumen tersebut telah mengalami kerugian.

UUPK juga secara tegas memuat prinsip ganti kerugian subjektif terbatas dan prinsip tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik, namun demikian, UUPK masih memiliki kekurangan-kekurangan, karena mengatur ketentuan yang secara prinsipil bersifat kontradiktif, yaitu di satu pihak menutup kemungkinan bagi produsen untuk mengalihkan tanggung gugatnya kepada konsumen, akan tetapi di pihak lain tetap memungkinkan untuk diperjanjikan batas waktu pertanggunggugatan.

Penulis berpendapat meskipun UUPK masih terdapat kekurangan, namun secara umum semakin membebani produsen untuk bertanggung gugat terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan tanggung gugatnya kepada konsumen, produsen juga dapat melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi tertentu. Namun, dalam prakteknya tidak semua risiko yang ditanggung oleh pihak produsen dapat diasuransikan, dan perusahaan asuransi ragu-ragu atau tidak mampu mengasuransikan risiko tanggung jawab produk. Karena beberapa karakteristik khusus dari risiko tanggung jawab produk yang memberatkan perusahaan asuransi, yaitu bersifat jangka panjang (long tail risk), sulit diprediksi (unpredictable), bahkan tak ada batas akhir (open ended).

UUPK sejatinya diharapkan dapat menjadi pelindung bagi konsumen yang memuat aturan-aturan hukum tentang perlindungan konsumen yang berupa payung bagi Perundang-Undangan lainnya yang menyangkut konsumen, sekaligus mengintegrasikan Perundang-Undangan itu sehingga memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, agar UUPK dapat memberikan proteksi secara maksimal kepada konsumen, maka seharusnya Pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti rugi kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadi kerugian, dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi.

Menjawab kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat sudah seharusnya pemerintah untuk memenuhinya. Pemerintah sebagai regulator, berfungsi membentuk Peraturan Perundang-Undangan sebagai alat penjamin kepastian hukum untuk mengatur, mengontrol dan mengawasi terciptanya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Legislatif bersama eksekutif harus berupaya optimal dalam pembaharuan hukum, bukan sebaliknya membuat Undang-Undang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik sesaat berjangka pendek tanpa memikirkan akibat serius yang mungkin ditimbulkan di masa yang akan datang.

Hal ini dimaksudkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dengan mewujudkan kebebasan untuk memenuhi masing-masing kebutuhan dengan keteraturan dari adanya kepastian hukum, yang memberikan apa yang menjadi hak dengan tidak mengurangi hak yang lain dari pelaku usaha dan konsumen. Memaknai akan pentingnya perlindungan konsumen secara tidak langsung telah menciptakan pola berbagai aspek antara satu dan lainnya yang mana memiliki hubungan dan saling mempengaruhi antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.

Menurut isi UUPK yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tentang asas dan tujuan dari perlindungan konsumen, oleh karena itu yang menjadi prinsip pemberlakuan UUPK adalah memastikan adanya proteksi hukum kepada konsumen dari kegiatan-kegiatan pelaku usaha yang mencederai hak konsumen. Dalam paragraf kesembilan penjelasan umum UUPK, dimuat dengan mengarah pada filosofi pembangunan nasional yang telah dirancang sejak awal bahwa pembangunan hukum yang menjamin adanya perlindungan terhadap konsumen, yang mana merupakan perwujudan dari membangun masyarakat Indonesia yang secara menyeluruh serta berpijak pada falsafah negara Indonesia.

Pembentukan UUPK dilandaskan pada besarnya kepentingan konsumen terhadap berang-barang konsumsi yang sepadan dengan alat pemuas kebutuhan. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian posisi tawar diantara para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen, yang dalam realitanya konsumen berada pada posisi tawar terendah sebagai bahan aktivitas usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha demi meraih keuntungan yang banyak dengan cara mengabaikan hak konsumen.

Setiap warga negara telah dijamin terhadap adanya kepastian hukum yang termuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, kepastian hukum tersebut diantaranya adalah hak terhadap perlindungan, adanya pengakuan, serta adanya kepastian hukum yang adil demi terwujudnya masyarakat yang aman dan tenteram. Selain itu, dalam Pasal tersebut terdapat nilai-nilai yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, sehingga apabila uraikan berdasarkan isi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang Berhak.

Dalam UUPK, berdasarkan penggalan kata “setiap orang berhak”. Yang mana dalam UUPK penggalan kata tersebut dianalogikan sebagai konsumen, itu disebabkan karena yang menjadi substansi objeknya adalah dari segi pandangan konsumen.

1. Pengakuan.

Pengakuan dalam substansi UUPK adalah pengakuan atas konsumen itu sendiri, baik dalam hal hak maupun kewajibannya yang termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK.

1. Jaminan.

Pemberian jaminan yang diatur dalam UUPK tercantum dalam Pasal 4 huruf h UUPK diantaranya “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Berdasarkan itu pemberian ganti kerugian merupakan suatu hal yang sudah selayaknya diperoleh oleh konsumen, maka dari itu UUPK telah menjamin hak konsumen.

4. Perlindungan

Adanya perlindungan disini dapat diterjemahkan dari pasal 4 huruf a UUPK yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Oleh sebab itu, dari sisi konsumen mempunyai hak untuk terlindungi dalam menggunakan barang dan jasa.

5. Kepastian Hukum Yang Adil.

Hukum dapat definisikan sebagai pemisah tentang hal yang wajar atau tidaknya di lakukan, dan pembatas berguna untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak. Bila dipelajari lebih khusus dalam pasal 4 dan Pasal 5 UUPK.

6. Perlakuan Yang Sama di Depan Hukum.

Asas negara hukum yaitu serangkaian yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam UUPK, mengenai kedudukan sama di depan hukum dapat diartikan tentang keseimbangan kewenangan yang sama rata antara konsumen dan pelaku usaha. Runut pada asas dan tujuan UUPK, menempatkan asas keseimbangan yang sama rata dan sama tupoksi diantara kedua belah pihak, dengan tujuan terwujudnya perlakuan yang adil depan hukum seperti yang diharapkan oleh Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Sistem Jaminan Produk Halal tidak berjalan secara efektif sehingga hak-hak konsumen menjadi terabaikan oleh tindakan pelaku usaha yang menjual produk tidak bersertifikasi halal, seharusnya hal tersebut dapat berperan demi terciptanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen bilamana ada hak-hak konsumen yang terabaikan.

# BAB V

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti,dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar lampung belum efektif dikarenakan hanya Sebagian dari masyarakat yang memperhatikan sertifikasi tersebut pada sebuah produk kosmetik sebelum menggunakannya dan sebagiannya lagi mereka menggunakan produk kosmetik hanya berdasarkan pada merknya saja. Dengan sertifikasi halal para konsumen merasa jauh lebih tenang dalan menggunakan sebuah produk kosmetik, terutama untuk konsumen yang beragama muslim.
2. Hambatan pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung adalah belum ada belum Adanya Regulasi (Peraturan Gubernur) Terhadap Pembentukan Tim Terpadu dan Kurangnya Sosialisasi Terhadap Sistem Jaminan Produk Halal.

## REFERENSI



Website:

https://insistpress.com/2017/12/07/petani-penguasa-dinamika-perjalanan-politik- agraria-indonesia-noer-fauzi-rachma

## BIODATA KETUA PENELITI DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG

Nama Lengkap : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Alamat Rumah (lengkap) : Jl. Dr.Susilo No.73 Kel.Sumur Batu Kec.Teluk Betung Utara Bandar lampung – 35214

Telepon Rumah : (0721) 255264

Nomor Ponsel 089672362373

Alamat E-mail : [dewi.septian@fh.unila.ac.id](mailto:dewi.septian@fh.unila.ac.id)

Alamat Kantor (lengkap) : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng,

Bandar Lampung - 35145

**Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Strata | Tahun Lulus | Perguruan Tinggi | Bidang Spesialisasi |
| S-1 | 2004 | Universitas Lampung | Hukum Perdata |
| S-2 | 2012 | Universitas Lampung | Hukum Ekonomi |

**Nama Mata Kuliah yang Diampu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Mata Kuliah** | **Strata** |
| 1 | Hukum Perdata | S-1 |
| 2 | Hukum Perikatan | S-1 |
| 3 | Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata | S-1 |
| 4 | Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama | S-1 |
| 5 | Praktik Perancangan Kontrak | S-1 |
| 6 | Hukum Telematika | S-1 |
| 7 | Hukum Waris | S-1 |
| 8 | Hukum Adat | S-1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Metodologi Penelitian Hukum | S-1 |
| 10 | Pendidikan Agama Islam | S-1 |

**Jumlah Mahasiswa yang Pernah Diluluskan**

|  |  |
| --- | --- |
| Strata | Jumlah |
| S-1 | 20 mahasiswa |

**Pengalaman Penelitian 5 (Lima) Tahun Terakhir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Topik/Judul Penelitian | Sumber Dana |
| 2015 | Analisis Yuridis Akibat Penolakan Sebagai Ahli Waris Menurut KUHPerdata | DIPA Fakultas |
| 2016 | Implementasi Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta Bank Indonesia (BI) terhadap Bank Bermasalah | DIPA BLU  Fakultas |
| 2017 | Nagoya Protokol: Membangun Mekanisme Bagi Hasil dan Pembagian Keuntungan (*Acces and Benefit Sharing)* Atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang Berkaitan dengan Obat-obatan Tradisional di Indonesia | DIPA BLU  Fakultas |
| 2017 | Analisis Yuridis Media Sosial *Instagram* sebagai Sarana dalam Transaksi Jual Beli Elektronik | DIPA BLU  Fakulta |
| 2018 | Analisis Yuridis Transaksi Elektronik dalam Perbankan | DIPA BLU  Fakultas |
| 2019 | Pengembangan Prinsip-prinsip Perjanjian Kemitraan dalam Pelaksanaan Konsep Creating Shared Value (CSV) pada PT. Great Gian Pineapple (GGP) dan Petani di Tanggamus | BLU Unila |
| 2019 | Pelaksanaan Pelaporan dan Pengawasan Transaksi Keuangan Nasabah Bank (Studi Pada PT Bank Danamon) | BLU Unila |

**Pengalaman Publikasi di Berkala Ilmiah 5 (Lima) Tahun Terakhir (tidak termasuk prosiding seminar)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama | Tahun Terbit | Volume dan Halamam | Judul Artikel | Nama Berkala | Status Akeditasi | Penulis |
| Dewi Septiana | 2016 | Vol XIV  No.1, Terbit Mei 2016  Hlm.111-120 | *Kedudukan Memorandum Of Understanding (moU)* Ditinjau dari Hukum Perjanjian | Jurnal Legalita | ISSN : 1412-2480 | Pertama |
| Dewi Septiana | 2018 | Vol 1, No 03  (2018)  Hlm. 283 -  294 | Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian  Pembiayaan Konsumen dengan Menggunakan  Lembaga Jaminan Fidusia (Studi pada PT.  FIF Kota Bandar Lampung) | Pactum Law Journal | ISSN: 2615 -  7837 | Ketiga |

**Pengalaman Penerbitan Buku 10 (Sepuluh) Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama (-nama) Penulis | Judul Buku | Tahun | Penerbit | ISBN |
| Dewi Septiana,S.H.,M.H. | Status Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Islam (dalam Hukum Perdata Dalam Berbagai Persfektif) | 2015 | Harakindo Publishing | 978-602-  1689-71-4 |
| Dewi Septiana,S.H.,M.H | Analisis Yuridis Sukuk Ritel sebagai Alternatif  Investasi (dalam Buku | 2019 | PKKP-HAM FH  Unila, Program Doktor Ilmu | 978-623-  211-024-3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jalan Sunyi Sang Guru (Mendidik dengan Cinta  – Membentuk Insan Hukum Bernurani) |  | Hukum Unila, dan CV. Anugrah Utama Raharja (AURA) |  |

Bandar Lampung, 1 Januari 2020 Yang menyatakan,

Dewi Septiana, S.H., M.H NIP 198009192005012003

## BIODATA ANGGOTA PENELITI DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG

1. **Data identitas Diri**

|  |  |
| --- | --- |
| Nama Lengkap (dengan gelar) | Siti Khoiriah S.H.I, M.H |
| Jabatan Fungsional | Asisten Ahli/III b |
| Jabatan Struktural | Dosen |
| NIP/NIK/Identitas lainnya | 198206132015042002 |
| NIDN | 0013068202 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Tanjung Kesuma, 13 Juni1982 |
| Alamt Rumah | Purbolinggo, Lampung Timur |
| Nomor Telepon/Faks/HP | 081310325837 (tlp)/ 085267205599 (watshapp) |
| Alamat Kantor | Jl Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar  Lampung |
| Nomor Telepon/Faks | Telp.0721-704623 |
| Alamat-email | [siti.khoiriah@fh.unila.ac.id](mailto:siti.khoiriah@fh.unila.ac.id) |
| Lulusan yang Telah dihasilkan | S-1= 4 orang; |
| Mata Kuliah Yang Diampu | 1. Hukum Tata Negara 2. Ilmu Negara 3. Hukum Pemerintahan Daerah 4. Hukum Perundang-Undangan 5. Perancangan Perundang-Undangan 6. Hukum Pemerintahan Desa 7. Hukum Acara dan Praktek Peradilan Konstitusi 8. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia |

1. **Riwayat Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **S-1** | S-2 |
| **Nama Perguruan Tinggi** | Institut Agama Islam Negeri | Universitas Indonesia |
| **Bidang Ilmu** | Syari’ah | Hukum Tata Negara |
| **Tahun Masuk-Lulus** | 2001-2008 | 2010-2012 |
| **JudulSkripsi/ Thesis/ Disertasi** | Eksistensi Peradilan Agama Menurut Undang-Undang Tentang Peradilan Agama | Konstruksi Hukum Kewenangan Kepala Daerah Dalam Sistem  Keuangan Daerah |
| **NamaPembimbingan/ Promotor** | Drs. Badruzzaman MH | Dr. Andika, SH, MH |

1. **Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Judul Penelitian** | **Sumber Dana** |
| 1 | 2015 | Kajian Yuridis Pemekaran Daerah | APBD Kab.  Lampung Utara |
| 2 | 2016 | Hukum Pengelolaan Keuangan Desa | DIPA FH UNILA |
| 3 | 2016 | Kajian Standar Operasional Prosedur RSUD | APBD Kab.  Tulang Bawang Barat |
| 4 | 2016 | Hukum Pengelolaan Keuangan Desa | DIPA FH UNILA |
| 5 | 2017 | Problem Hukum Desa di Pesisir | DIPA FH UNILA |
| 6 | 2017 | Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya Dengan  Pemberian Sertifikat Tanah Bagi Transmigran | DPD RI |
| 7 | 2018 | Model Hukum Pengayoman Untuk Melindungi  Dan Memberdayakan Desa Tahun pertama | DRPM Menristek  Dikti |
| 8 | 2018 | Sinkronisasi Peraturan Desa Di Kabupaten  Lampung Timur Terkait Pembangunan | BLU Unila |
| 9 | 2018 | Peta Peraturan Desa Di Kabupaten Lampung  Timur | BLU Unila |
| 10 | 2019 | Model Hukum Pengayoman Untuk Melindungi  Dan Memberdayakan Desa Tahun kedua | DRPM Menristek  Dikti |
| 11 | 2019 | Penguatan Desa Wisata Melalui Penyusunan  Peraturan Desa | BLU UNILA |

1. **Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 2 TahunTerakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tahun** | **Judul Pengabdian Kepada Masyarakat** | **Pengabdian** |
| 1 | 2016 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa | DIPA FH UNILA |
| 2 | 2017 | Inisiasi Pembentukan Peraturan Desa Ramah  Anak | DIPA FH UNILA |
| 3 | 2019 | Penguatan Kebijakan Pemerintah Desa Dalam  Memberikan Perlindungan terhadap Anak | BLU Unila |

1. **Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Nasional 3 Tahun Terakhir**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul/Artikel Ilmiah** | **Volume/Nomor/Tahun** | **Nama Jurnal** |
| 1 | Regulasi dan Pengelolaan  Keuangan Desa | 2017 | FIAT  JUSTICIA |
| 2 | *Village of Financial Managemen* | 978-602-0860-11-4 | Prociding  SHIELD |
| 3 | Law Problem On The Coastal Village | 2017 | Prociding 2nd SHIELD |
| 4 | Kendala Peningkatan Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam  Penentuan Kebijakan |  | Monograf Seminar  Nasional |
| 5 | Evaluation Of Indonesian Transmigration Law According To Land Certification For  Transmigrants | ISSN 2224-3240  (Paper) ISSN 2224-  3259 (Online)  Vol.66, 2017 | Journal of Law, Policy and Globalization |
| 6 | Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Konstitusional Perempuan Adat | ISBN 978-602-1351-  93- 2. | Pancasila, Konstitusi dan Pemenuhan Hak Konstitusional  Perempuan |
| 7 | Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. | Masalah - Masalah Hukum, Jilid 46 No. 1,  Januari 2017, Halaman  20-29 | Masalah- Masalah Hukum Universitas  Diponegoro. |
| 8 | 18 Years of Decentralization Experiment in Indonesia: Institutional and Democratic Evaluation. | Journal of Politics and Law; Vol. 10, No. 5;  2017 | Jurnal Politic and Law |
| 9 | Kendala Peningkatan Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Penentuan Kebijakan | Dipresentasikan Pada Seminar nasional bertajuk “Membangun Budaya Adil Gender dan ramah Anak” | FH Unila bekerjasama dengan Kementerian  PPPA Republik Indonesia. |
| 10 | *Human, Resources and Nawacita* | Dipresentasikan pada konferensi internasional  SHIELD 4 | Pasca Sarjana Universitas  Lampung |
| 11 | Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum | Vol 13, No 01 (2019) | Wacana Publik |

1. **Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir**

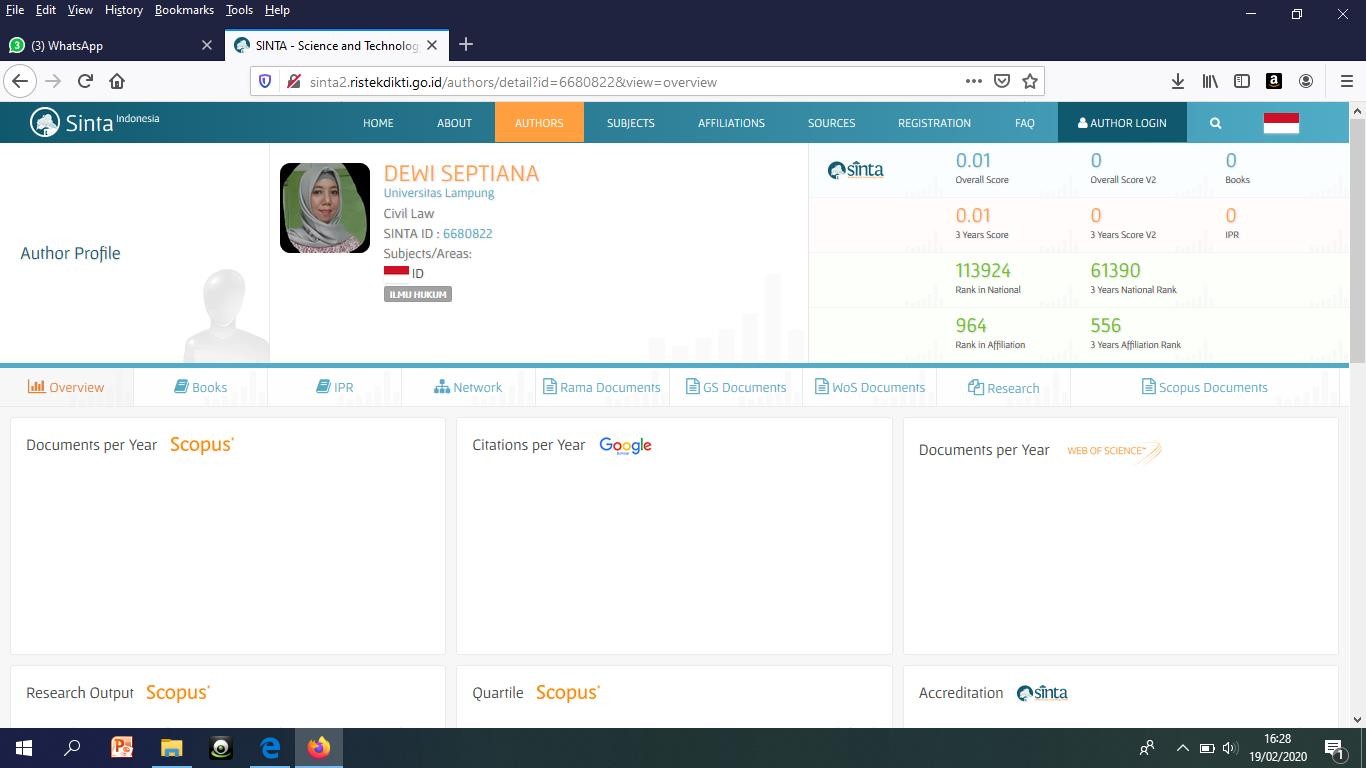
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Buku** | **Tahun** | **Jumlah Halaman** | **Penerbit** |
| 1 | Panduan Sosialisasi Pilkada 2015 | 2015 | 12 | PW Lakpesdam  NU |
| 2 | Hukum Pemerintahan Daerah | 2016 | 128 | Intelegensia  Media Malang |
| 3 | Ilmu Negara | 2017 |  | AURA |
| 4 | Negara Hukum dan Demokrasi | 2017 | 122 | Zam-Zam |
| 5 | Kelembagaan Negara dan Sistem  Demokrasi | 2017 | 117 | Zam-Zam |
| 6 | Hukum Perlindungan Perempuan dan  Anak | 2017 | 132 | Zam-Zam |
| 7 | Lembaga Perwakilan | 2017 | 127 | Zam-Zam |
| 8 | Monograf; Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Konstitusional  Perempuan Adat | 2017 | 284 | Thafa Media |
| 9 | Pedoman Pembentukan Peraturan Desa  (*Model Sosial Justice Assesment*) | 2018 |  | AURA  Publishing |
| 10 | Gerakan Malu Menganggur | 2018 |  | AURA  Publishing |
| 11 | Model *Sosial Justice Assesment* Dalam  Pembentukan Peraturan di Daerah | 2018 |  | AURA  Publishing |
| 12 | Image Demokrasi Lampung Timur | 2018 |  | AURA  Publishing |
| 13 | Perempuan Membangun Dan Bela  Negara | 2018 |  | AURA  Publishing |
| 14 | Hak Konstitusional Tebaran Pemikiran  dan Gagasan | 2019 |  | AURA  Publishing |
| 15 | Kebijakan Pemda dalam Pengembangan SDM di Desa Pesisir dalam Monograf Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi  Daerah | 2019 |  | AURA  Publishing |

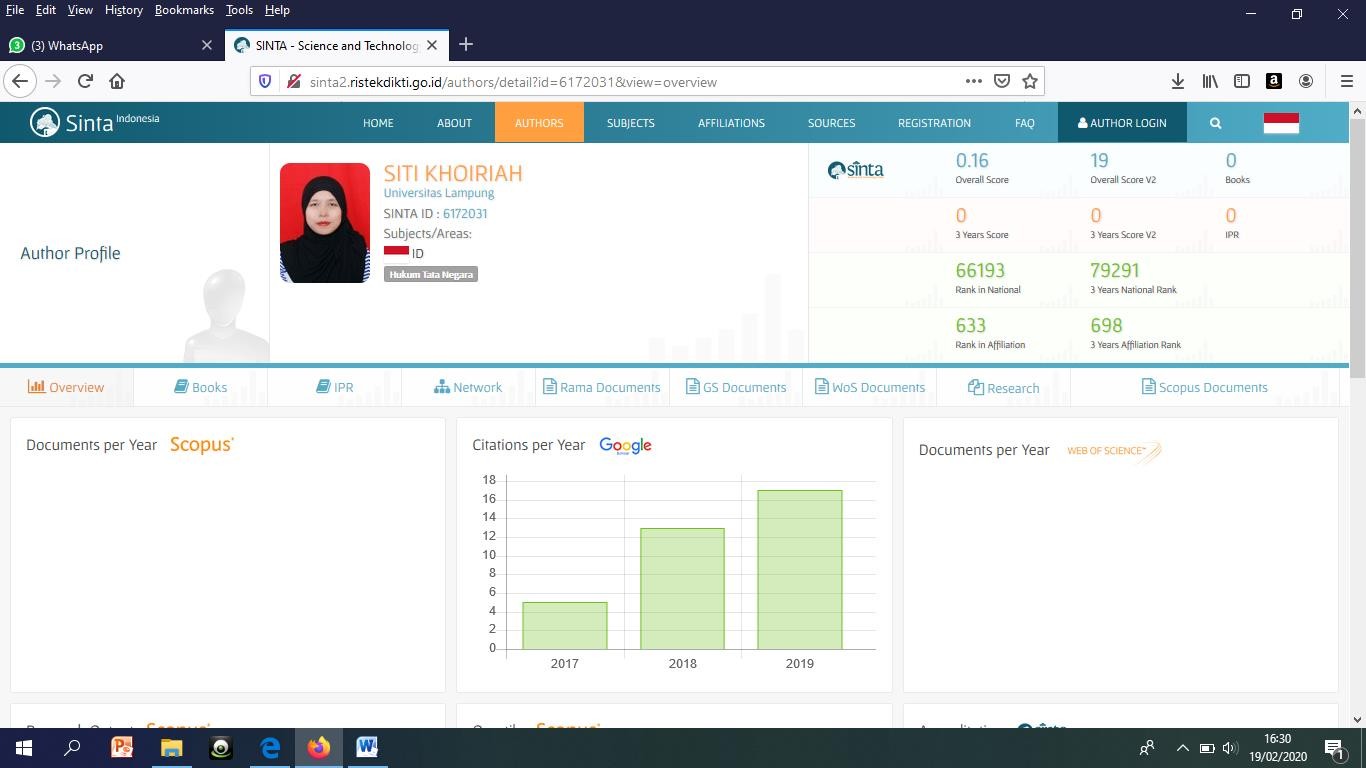
Bandar Lampung, 5 Februari 2020

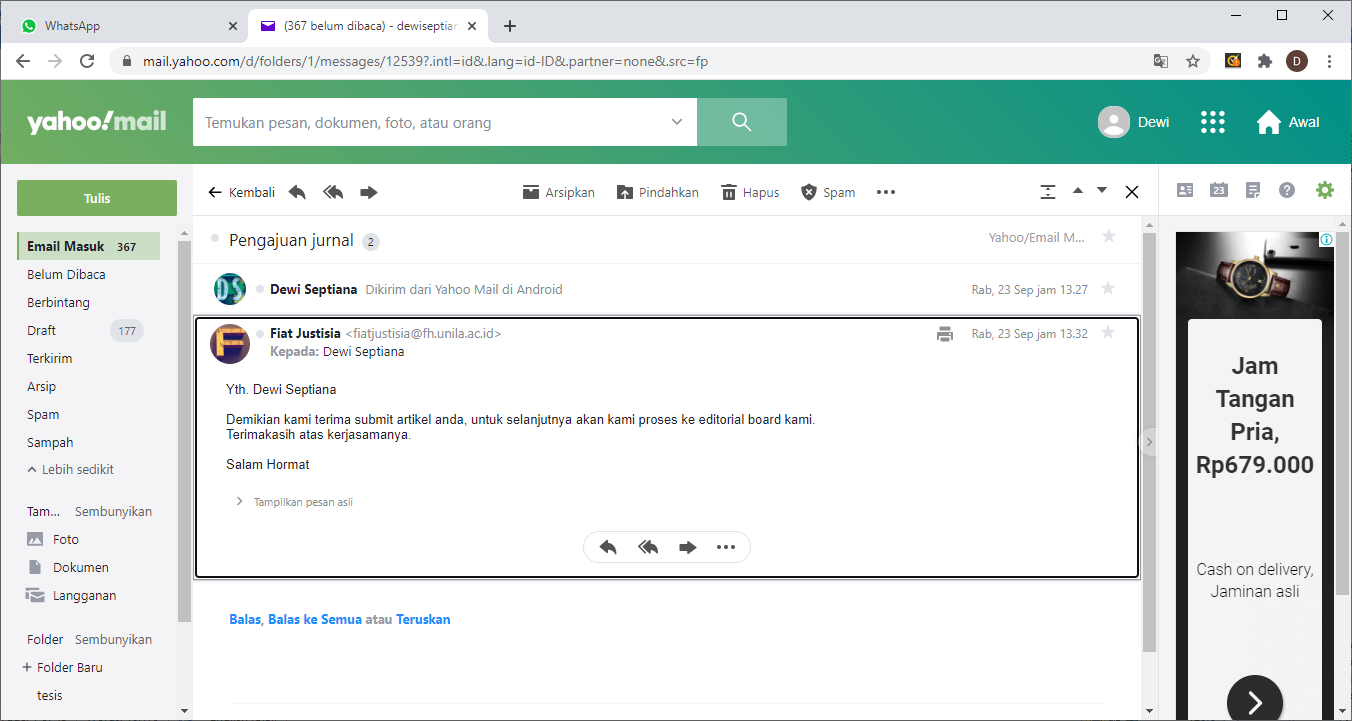


Siti Khoiriah, S.H.I., M.H

NIP 198206132015042002







BUKTI SUBMIT JURNAL FIAT JUSTISIA (SINTA 2) TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020 DENGAN ALAMAT EMAIL : FIATJUSTISIA@FH.UNILA.AC.ID

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK**

**Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.1**

**Dr. Amnawaty, S.H., M.H.2**

**Ahmad Zazili, S.H., M.H.3**

**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.4**

1Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [*mwendytrijaya@gmail.com*](mailto:mwendytrijaya@gmail.com)

2Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [*amnawati.1957@fh.unila.ac.id*](mailto:amnawati.1957@fh.unila.ac.id)

3Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [*ahmad.zazili@fh.unila.ac.id*](mailto:ahmad.zazili@fh.unila.ac.id)

4Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [*sitinurhasanahsarmili@gmail.com*](mailto:sitinurhasanahsarmili@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah dan sehat untuk manusia. salah satunya penggunaan kosmetik dan oba obatan. Perkembangan industri kosmetik dan perawatan diri di negara Indonesia telah meningkat sangat pesat, dimana industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, terdapat permasalahannya yang muncul yaitu bagaimana efektivitas pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung dan apa sajakah hambatan-hambatan dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah, membentuk landasan kebijakan pemerintah dan inventarisasi produk ke dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Landasan kebijakan dalam bentuk peraturan sangat dibutuhkan berkenaan dengan kendala yang dihadapi oleh para pengguna atau konsumen kosmetik. Mereka mengharapkan adanya perlindungan hukum dalam menggunakan produk kosmetik yang mereka gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach). pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan landasan kewenangan pemerintah dalam mengatur mengenai pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini sejalan dengan rencana strategis penelitian Universitas Lampung yaitu pada fokus topik riset (a) aspek hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan (b) Perlindungan hukum terhadap kegiatan bermasyarakat. Urgensi penelitian ini adalah menganalisis isi peraturan tentang sertifikasi halal dan penerapannya dalam praktik. Selain itu out put lain dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada pertemuan ilmiah dan jurnal nasional.

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK**

**Dewi Septiana, S.H., M.H.1**

**Siti Khoiriah,S.HI.,M.H2**

**Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.1**

**Dr. Amnawaty, S.H., M.H.2**

**Ahmad Zazili, S.H., M.H.3**

**Siti Nurhasanah, S.H., M.H.4**

1Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [*mwendytrijaya@gmail.com*](mailto:mwendytrijaya@gmail.com)

2Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [*amnawati.1957@fh.unila.ac.id*](mailto:amnawati.1957@fh.unila.ac.id)

3Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [*ahmad.zazili@fh.unila.ac.id*](mailto:ahmad.zazili@fh.unila.ac.id)

4Fakultas Hukum Universitas Lampung

Email: [*sitinurhasanahsarmili@gmail.com*](mailto:sitinurhasanahsarmili@gmail.com)

**1. PENDAHULUAN**

## Kosmetik saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer bagi para wanita Indonesia guna tampil lebih cantik dan menarik. Sebagai kebutuhan primer, maka banyak muncul produk kosmetik untuk wanita di Indonesia. Para produsen kosmetik mulai berlomba dan berinovasi dalam membuat dan menciptakan produk-produk kosmetik tersebut.

## Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah dan sehat untuk manusia. Islam mengajarkan kita agar senantiasa untuk selalu mengkonsumsi yang ada di muka bumi ini yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman juga seperti kosmetik, obat-obatan dan lain-lainnya.

## Al Qur'an dan Al Hadis sebagai sumber hukum yang utama bagi umat Islam telah secara jelas dan tegas menetapkan bahwa ada makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik yang halal dan baik untuk dikonsumsi dan digunakan namun ada pula makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik yang haram untuk dikonsumsi dan digunakan, serta ada pula bahan pangan dan produk lainnya hasil olahan rekayasa genetik yang dapat menimbulkan keraguan mengenai status halal atau haramnya.[[19]](#footnote-19)

## Perkembangan industri kosmetik dan perawatan diri di negara Indonesia telah meningkat sangat pesat, dimana industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional. Industri kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan., dari total tersebut sebanyak 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah (IKM) dan sisanya industri skala besar.

## Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementrian Perindustrian, pelaku industri kosmetik sulit meningkatkan kinerja bisnisnya akibat penguasaan pangsa pasar produk impor sebesar 60% dari total pasar domestik senilai Rp 15 triliun. Pasar kosmetik kelas menengah ke atas banyak didominasi produk dari Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dan untuk kelas menengah banyak dihuni oleh produk asal Thailand, Korea Selatan dan Malaysia. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk kosmetik yang ternotifikasi mayoritas hadir dari produk impor dalam waktu kurun waktu 2011-2014. Tahun lalu produk kosmetik yang teregistrasi sebanyak 36.642 yang berasal dari produk lokal sebesar 40,52%, produk ASEAN 4,69%, Eropa 28,58% dan negara lainnya 26,21%.

## Upaya dalam menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas pelindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.[[20]](#footnote-20)

## Pemerintah Indonesia dalam mengingat pentingnya produk kosmetik halal tersebut memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan mencantumkan label halal pada produk kosmetik, baik kosmetik yang dibuat di Indonesia maupun produk kosmetik yang dibuat dan di impor dari luar negeri. Berbagai peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

## Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 8 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label halal.

## Memenuhi perlindungan terhadap produk kosmetik tersebut maka pemerintah dibantu oleh badan dan lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau dikenal dengan LPPOM-MUI dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau dikenal dengan BPOM sebagai lembaga pengaudit sertifikasi halal telah digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disingkat dengan (BPJPH).

## BPJPH adalah sebuah lembaga pelaksanan sertifikasi halal yang berada di bawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekaligus menjadi babak baru penyelenggaraan sertifikasi produk halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan di resmikan pada 11 Oktober 2017, namun untuk sementara waktu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih menunggu Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal demi membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan demikian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) masih berwenang melakukan tugas sebagaimana yang dilakukan selama ini dalam penerbitan sertifikasi halal.

## LPPOM-MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika tersebut aman dikonsumsi dan digunakan baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim di Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. [[21]](#footnote-21)

## Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk kosmetik di daerah Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung?

**II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative. Dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data digunakan dengan studi Pustaka dan studi dokumen. Strauss dan Corbin (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif (Bungin, 2010). Secara operasional analisis data penelitian kualitatif adalah proses menyusun data (menggolongkannya dalam tema atau kategori) agar dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan. Kegiatan pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini tidak terpisah satu sama lain. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 6 bulan akan menghasilkan saran dan pertimbangan, terhadap kebijakan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

**III. PEMBAHASAN**

**1. Efektivitas Pencantuman Sertifikasi Halal pada Produk Kosmetik di Kota Bandar Lampung**

**2. Hambatan Pencantuman Sertifikasi Halal Produk Kosmetik di Bandar Lampung**

Sistem jaminan produk halal diharapkan dapat menjadi standar baru dalam bidang produksi produk makanan maupun minuman bagi pelaku usaha, selain itu. Pemerintah dalam hal ini terus menggiatkan pelaksanaan sertifikasi halal. Melalui BPJPH Bandar Lampung, pemerintah terus memastikan agar pelaku usaha terus menyediakan produk yang melalui proses sertifikasi halal, hal ini bertujuan untuk memastikan adanya proteksi terhadap keamanan, serta adanya perlindungan hukum yang diberikan untuk masyarakat pada saat mengkonsumsi dan memakai produk yang sudah terjamin halal serta higienis, demi terwujudnya kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu hambatan-hambatan dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Belum Adanya Regulasi (Peraturan Gubernur) Terhadap Pembentukan Tim Terpadu
2. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Sistem Jaminan Produk Halal.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Sistem Jaminan Produk Halal tidak berjalan secara efektif sehingga hak-hak konsumen menjadi terabaikan oleh tindakan pelaku usaha yang menjual produk tidak bersertifikasi halal, seharusnya hal tersebut dapat berperan demi terciptanya kepastian hukum dalam perlindungan konsumen bilamana ada hak-hak konsumen yang terabaikan.

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti,dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar lampung belum efektif dikarenakan hanya Sebagian dari masyarakat yang memperhatikan sertifikasi tersebut pada sebuah produk kosmetik sebelum menggunakannya dan sebagiannya lagi mereka menggunakan produk kosmetik hanya berdasarkan pada merknya saja. Dengan sertifikasi halal para konsumen merasa jauh lebih tenang dalan menggunakan sebuah produk kosmetik, terutama untuk konsumen yang beragama muslim.
2. Hambatan pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung adalah belum ada belum Adanya Regulasi (Peraturan Gubernur) Terhadap Pembentukan Tim Terpadu dan Kurangnya Sosialisasi Terhadap Sistem Jaminan Produk Halal.

**REFERENSI**



1. Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, hlm 8. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, hlm 27. [↑](#footnote-ref-2)
3. Asrina-Lince Bulutoding, *Op Cit.* hlm 4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik pasal 1 ayat (1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Retno Iswari Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. hlm. 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745, *Op.cit.,* hlm. 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-7)
8. Bagian Proyek Sarana Prasarana Produk Halal Direktrorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta, 2003, hlm 2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ismi Aziz Makrufah, Skripsi: *“Pengaruh Citra Merek dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi pada Konsumen di Outlet Toserba Laris Kartasura)”*, Surakarta: Institut Agama Islam Surakarta.2017. hlm.22. [↑](#footnote-ref-9)
10. Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal,* Malang, UIN: Maliki Press, 2011, hlm. 140. [↑](#footnote-ref-10)
11. https://kbbi.web.id. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 21.45 WIB. [↑](#footnote-ref-11)
12. Panduan umum sistem jaminan halal, Jakarta, LPPOM-MUI, 2008. hlm. 8. [↑](#footnote-ref-12)
13. MUI, <http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pada pukul 21.51 WIB. [↑](#footnote-ref-13)
14. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, [http://setkab. go. id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/, diakses](http://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/,dikutip) pada 28 Oktober 2018 pukul 22.30 WIB. [↑](#footnote-ref-14)
15. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, businesslaw.binus.ac.id/2017/11/18/ badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 22.44 WIB. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ainul Yaqin, <http://hpainternational.id/sejarah-lppom-mui-dan-sertifikasi-halal-di-indonesia/>diakses pada 28 Oktober 2018 pukul 23.25 WIB [↑](#footnote-ref-18)
19. Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, hlm 8. [↑](#footnote-ref-19)
20. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, hlm 27. [↑](#footnote-ref-20)
21. Asrina-Lince Bulutoding, *Op Cit.* hlm 4. [↑](#footnote-ref-21)